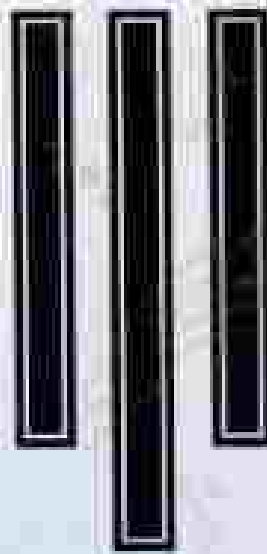




**RENCANA KERJA (RENJA)
PERUBAHAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2025**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 101 Sanggau 78512

Alamat Website : www.sanggau.go.id Email : bpkad@sanggau.go.id

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sanggau Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai bahan penelaahan dalam penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2025, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan pencapaian visi misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sekaligus sebagai pedoman penyusunan Anggaran BPKAD serta merupakan acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada BPKAD Kabupaten Sanggau.

Tersusunnya Renja BPKAD Tahun 2025 akan mengacu pada Renstra BPKAD Tahun 2025-2029 dan hasil evaluasi hasil Renja BPKAD tahun lalu serta hasil evaluasi Renja BPKAD tahun berjalan serta berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah.

Renja BPKAD Kabupaten Sanggau Tahun 2025 ini tentunya tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami nantikan guna perbaikan kinerja organisasi dimasa yang akan datang.

Sanggau, 4 Juni 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN SANGGAU



SILVESTRA DAYANA SIMBOLON, SE, MM

Pemihra Utama Muda

NIP. 19671126 198503 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Kabupaten Sanggau Sampai Dengan Triwulan I Tahun Berkenaan	8
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan BPKAD	12
2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD	14
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	22
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPKAD	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	23
3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja BPKAD	24
3.3 Program dan Kegiatan	24
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD	26
BAB V PENUTUP	31

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dari proses perencanaan. Apabila perencanaan itu disusun dengan baik dan melibatkan seluruh *stakeholders* dan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin dihadapi, maka pencapaian tujuan yang diita-citakan akan lebih besar kemungkinannya realisasinya. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau yang merupakan unsur penunjang pelaksana kegiatan Kepala Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah diharapkan dapat membuat suatu perencanaan yang komprehensif guna mendukung dan mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sanggau saat ini.

Di era globalisasi dan Otonomi Daerah dewasa ini tugas yang dijalankan pemerintah, terutama Pemerintah Daerah semakin berat. Dengan kemandiriannya, Daerah diharapkan mampu untuk menjalankan roda pemerintahan terutama dalam hal pembiayaannya dan merealisasikan aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Dengan semakin meningkatnya aktivitas yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah, maka kegiatan pengelolaan keuangan dan aset daerah semakin meningkat juga, terutama pengelolaan keuangan dan aset daerah yang semakin transparan dan akuntabel. Hal ini menuntut peran dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai *leading sector* di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk merespon segala bentuk dinamika dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang kian kompleks.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih, dan bertanggung jawab maka dikeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, khususnya pada pasal 4 yang menyatakan bahwa Pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis (Renstrat). Melalui kebijakan ini, Kepala Perangkat Daerah diwajibkan melaksanakan akuntabilitas kinerja dengan membuat perencanaan strategi yang dituangkan

dalam Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Rencana Kerja Perubahan menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan Tahun 2025. Rencana kinerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, serta menjadi komitmen bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator sasaran dan rencana capaian program, kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya yang meliputi indikator *inputs*, *outputs*, *outcomes*, *benefit* dan *impact*. Dokumen Rencana Kerja Perubahan juga memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Penetapan indikator-indikator kerja baik pada tingkat sasaran maupun pada tingkat kegiatan, harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisir, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, selain didukung dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), juga didukung dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sasaran yang ditetapkan dan akan dicapai dalam tahun anggaran 2025 adalah meliputi 3 (Tiga) program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 70 (Tujuh Puluh) Sub kegiatan, sebagaimana teruang dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5641);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Permendagri Nomor 050-S889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Permutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2034; dan
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.
28. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 20 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Perubahan BPKAD Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bagian untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi BPKAD sekaligus sebagai acuan dan pedoman penyusunan anggaran BPKAD dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk itu, tujuan penyusunan Renja Perubahan BPKAD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menegakan tujuan, sasaran, program, dan indikator kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD Tahun 2025 yang merupakan implementasi dari Renstra BPKAD Tahun 2025-2026;
2. Menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tujuan, sasaran, program, dan indikator kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD Tahun 2025;
3. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi serta dalam rangka menilai kinerja organisasi;
4. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan bagi setiap aparatur di lingkungan BPKAD dalam berfikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Perubahan BPKAD disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah, terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Kabupaten Sanggau Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Sanggau
- 2.3. Itu - Itu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN BPKAD

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja BPKAD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKAD KABUPATEN SANGGAU SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subjek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang, peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sanggau khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Secara umum Rencana Kerja Perubahan (Renja) BPKAD Tahun 2025 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional yang tertuang dalam Renstra BPKAD Tahun 2025-2029. Keberhasilan suatu proses pembangunan di tahun-tahun mendatang akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra BPKAD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, tingkat pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau sampai dengan triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Tingkat Capaian
1	Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Pengelolaan keuangan dan aset daerah	50%
2	Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal pemerintah daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja (AKIP) BPKAD	B

(data tahun 2025)

No	Sasaran	Tingkat Capaian Sasaran				Ket
		SB	B	CB	TB	
1	Meningkatnya Pengelolaan keuangan dan aset daerah	SB				30,14%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja (AKIP) BPKAD	SB				B

(data tahun 2025)

SB= Sangat Berhasil, B= Berhasil, CB= Cukup Berhasil, TB= Tidak Berhasil

Berdasarkan uraian di atas, tingkat capaian kinerja ke-3 (Tiga) sasaran dalam rangka mewujudkan misi dan tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dikategorikan **"Sangat Berhasil"** sebagaimana terlihat pada tabel di atas.

Secara lebih rinci pencapaian masing-masing sasaran akan disajikan sebagai berikut :

Sasaran 1 :

"Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (WTP)"

Sasaran ini diarahkan untuk melaksanakan kegiatan Badan yang dimulai dari penyusunan anggaran dan pelaksanaan realisasi anggaran secara terbuka, transparan, tertib dan akuntabel serta tepat waktu dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Secara lebih rinci, pencapaian indikator kinerja sasaran BPKAD sampai dengan triwulan II tahun 2025, adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP dan tepat waktu	%	100	25	30,14%
2.	Persentase Tingkat Ketertiban Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	70	38,29	38,29%
J U M L A H					34,21%

(data tahun 2025)

Berdasarkan tingkat capaian indikator sasaran tersebut, dengan metode rata-rata tertimbang data kelompok dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran **"Optim. BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (WTP)"** dikategorikan **"Sangat Berhasil"**.

Sasaran 2 :

"Meningkatnya akuntabilitas kinerja (AKIP) BPKAD"

Sasaran ini diarahkan agar terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas seluruh penggunaan dana APBD yang digunakan sesuai dengan ketentuan dan anggaran yang ditetapkan secara transparan, tertib dan akuntabel.

Keberhasilan yang paling utama dari pelaksanaan sasaran ***"Meningkatnya akuntabilitas kinerja (AKIP) BPKAD"*** adalah Nilai AKIP BPKAD.

Secara lebih rinci, pencapaian indikator kinerja sasaran BPKAD sampai dengan triwulan II tahun 2025, adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai AKIP BPKAD	%	CC	B	50%
J U M L A H					50%

(data tahun 2025)

Berdasarkan tingkat capaian indikator sasaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya akuntabilitas kinerja (AKIP) BPKAD"** dikategorikan **"Sangat Berhasil"**.

Dana APBD yang dikelola BPKAD dan dianggarkan untuk mendukung keberhasilan pencapaian kedua sasaran di atas adalah sebesar Rp281.769.086.163,33 dan terealisasi sebesar Rp132.319.355.979,00 atau sebesar 46,96%.

Berikut ini terlampir capaian kinerja yang disajikan dalam bentuk tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 sebagai berikut:

Date	Project Name / Description	Project Manager / Supervisor	Project Budget (USD)	Actual Budget (USD)	Variance (USD)	Progress & Status		Project Completion %	Project Status	Project Notes	Project ID
						Planned Budget (USD)	Actual Budget (USD)				
2023-01-01	Project A: New Product Development	John Doe	1,000,000.00	950,000.00	50,000.00	1,000,000.00	950,000.00	95%	Completed	Project A completed successfully.	PA-001
2023-02-01	Project B: Marketing Campaign	Jane Smith	500,000.00	520,000.00	20,000.00	500,000.00	520,000.00	100%	Completed	Project B completed with a slight budget overrun.	PB-002
2023-03-01	Project C: IT System Upgrade	Mike Johnson	2,500,000.00	2,400,000.00	100,000.00	2,500,000.00	2,400,000.00	96%	Completed	Project C completed ahead of schedule.	PC-003
2023-04-01	Project D: Customer Service Portal	Sarah Lee	750,000.00	780,000.00	30,000.00	750,000.00	780,000.00	100%	Completed	Project D completed with a slight budget overrun.	PD-004
2023-05-01	Project E: New Market Research	David Brown	300,000.00	310,000.00	10,000.00	300,000.00	310,000.00	100%	Completed	Project E completed with a slight budget overrun.	PE-005
2023-06-01	Project F: HR System Upgrade	Emily White	1,200,000.00	1,150,000.00	50,000.00	1,200,000.00	1,150,000.00	96%	Completed	Project F completed ahead of schedule.	PF-006
2023-07-01	Project G: Sales Training Program	Robert Green	400,000.00	420,000.00	20,000.00	400,000.00	420,000.00	100%	Completed	Project G completed with a slight budget overrun.	PG-007
2023-08-01	Project H: Logistics Optimization	Lisa Black	600,000.00	580,000.00	20,000.00	600,000.00	580,000.00	97%	Completed	Project H completed ahead of schedule.	PH-008
2023-09-01	Project I: Financial Reporting System	Kevin Gray	800,000.00	820,000.00	20,000.00	800,000.00	820,000.00	100%	Completed	Project I completed with a slight budget overrun.	PI-009
2023-10-01	Project J: New Product Launch	Amanda Pink	1,500,000.00	1,450,000.00	50,000.00	1,500,000.00	1,450,000.00	97%	Completed	Project J completed ahead of schedule.	PJ-010
2023-11-01	Project K: Customer Feedback Analysis	Chris Blue	200,000.00	210,000.00	10,000.00	200,000.00	210,000.00	100%	Completed	Project K completed with a slight budget overrun.	PK-011
2023-12-01	Project L: Internal Audit	Michelle Yellow	350,000.00	360,000.00	10,000.00	350,000.00	360,000.00	100%	Completed	Project L completed with a slight budget overrun.	PL-012
2024-01-01	Project M: New Market Entry	James Purple	900,000.00	880,000.00	20,000.00	900,000.00	880,000.00	98%	Completed	Project M completed ahead of schedule.	PM-013
2024-02-01	Project N: HR Policy Update	Patricia Red	150,000.00	160,000.00	10,000.00	150,000.00	160,000.00	100%	Completed	Project N completed with a slight budget overrun.	PN-014
2024-03-01	Project O: Sales Process Improvement	Christopher Green	450,000.00	440,000.00	10,000.00	450,000.00	440,000.00	98%	Completed	Project O completed ahead of schedule.	PO-015
2024-04-01	Project P: New Product Development	Stephanie Blue	1,100,000.00	1,050,000.00	50,000.00	1,100,000.00	1,050,000.00	95%	Completed	Project P completed ahead of schedule.	PP-016
2024-05-01	Project Q: Marketing Campaign	Anthony Yellow	650,000.00	670,000.00	20,000.00	650,000.00	670,000.00	100%	Completed	Project Q completed with a slight budget overrun.	PQ-017
2024-06-01	Project R: IT System Upgrade	Michelle Purple	2,200,000.00	2,100,000.00	100,000.00	2,200,000.00	2,100,000.00	95%	Completed	Project R completed ahead of schedule.	PR-018
2024-07-01	Project S: Customer Service Portal	Robert Red	700,000.00	720,000.00	20,000.00	700,000.00	720,000.00	100%	Completed	Project S completed with a slight budget overrun.	PS-019
2024-08-01	Project T: New Market Research	Lisa Green	320,000.00	330,000.00	10,000.00	320,000.00	330,000.00	100%	Completed	Project T completed with a slight budget overrun.	PT-020
2024-09-01	Project U: HR System Upgrade	Kevin Blue	1,300,000.00	1,250,000.00	50,000.00	1,300,000.00	1,250,000.00	96%	Completed	Project U completed ahead of schedule.	PU-021
2024-10-01	Project V: Sales Training Program	Amanda Yellow	420,000.00	440,000.00	20,000.00	420,000.00	440,000.00	100%	Completed	Project V completed with a slight budget overrun.	PV-022
2024-11-01	Project W: Logistics Optimization	Chris Purple	580,000.00	560,000.00	20,000.00	580,000.00	560,000.00	97%	Completed	Project W completed ahead of schedule.	PW-023
2024-12-01	Project X: Financial Reporting System	Michelle Red	780,000.00	800,000.00	20,000.00	780,000.00	800,000.00	100%	Completed	Project X completed with a slight budget overrun.	PX-024
2025-01-01	Project Y: New Product Launch	James Green	1,400,000.00	1,350,000.00	50,000.00	1,400,000.00	1,350,000.00	97%	Completed	Project Y completed ahead of schedule.	PY-025
2025-02-01	Project Z: Customer Feedback Analysis	Patricia Blue	180,000.00	190,000.00	10,000.00	180,000.00	190,000.00	100%	Completed	Project Z completed with a slight budget overrun.	PZ-026
2025-03-01	Project AA: Internal Audit	Christopher Yellow	330,000.00	340,000.00	10,000.00	330,000.00	340,000.00	100%	Completed	Project AA completed with a slight budget overrun.	PA-027
2025-04-01	Project AB: Sales Process Improvement	Stephanie Purple	460,000.00	470,000.00	10,000.00	460,000.00	470,000.00	100%	Completed	Project AB completed with a slight budget overrun.	PB-028
2025-05-01	Project AC: New Product Development	Anthony Red	1,150,000.00	1,100,000.00	50,000.00	1,150,000.00	1,100,000.00	95%	Completed	Project AC completed ahead of schedule.	PC-029
2025-06-01	Project AD: Marketing Campaign	Michelle Green	680,000.00	700,000.00	20,000.00	680,000.00	700,000.00	100%	Completed	Project AD completed with a slight budget overrun.	PD-030
2025-07-01	Project AE: IT System Upgrade	Robert Blue	2,300,000.00	2,200,000.00	100,000.00	2,300,000.00	2,200,000.00	95%	Completed	Project AE completed ahead of schedule.	PE-031
2025-08-01	Project AF: Customer Service Portal	Lisa Yellow	720,000.00	740,000.00	20,000.00	720,000.00	740,000.00	100%	Completed	Project AF completed with a slight budget overrun.	PF-032
2025-09-01	Project AG: New Market Research	Kevin Purple	340,000.00	350,000.00	10,000.00	340,000.00	350,000.00	100%	Completed	Project AG completed with a slight budget overrun.	PG-033
2025-10-01	Project AH: HR System Upgrade	Amanda Red	1,350,000.00	1,300,000.00	50,000.00	1,350,000.00	1,300,000.00	96%	Completed	Project AH completed ahead of schedule.	PH-034
2025-11-01	Project AI: Sales Training Program	Chris Green	440,000.00	460,000.00	20,000.00	440,000.00	460,000.00	100%	Completed	Project AI completed with a slight budget overrun.	PI-035
2025-12-01	Project AJ: Logistics Optimization	Michelle Blue	590,000.00	570,000.00	20,000.00	590,000.00	570,000.00	97%	Completed	Project AJ completed ahead of schedule.	PJ-036
2026-01-01	Project AK: Financial Reporting System	James Yellow	790,000.00	810,000.00	20,000.00	790,000.00	810,000.00	100%	Completed	Project AK completed with a slight budget overrun.	PK-037
2026-02-01	Project AL: New Product Launch	Patricia Purple	1,450,000.00	1,400,000.00	50,000.00	1,450,000.00	1,400,000.00	97%	Completed	Project AL completed ahead of schedule.	PL-038
2026-03-01	Project AM: Customer Feedback Analysis	Christopher Red	190,000.00	200,000.00	10,000.00	190,000.00	200,000.00	100%	Completed	Project AM completed with a slight budget overrun.	PM-039
2026-04-01	Project AN: Internal Audit	Stephanie Green	340,000.00	350,000.00	10,000.00	340,000.00	350,000.00	100%	Completed	Project AN completed with a slight budget overrun.	PN-040
2026-05-01	Project AO: Sales Process Improvement	Anthony Blue	470,000.00	480,000.00	10,000.00	470,000.00	480,000.00	100%	Completed	Project AO completed with a slight budget overrun.	PO-041
2026-06-01	Project AP: New Product Development	Michelle Yellow	1,180,000.00	1,130,000.00	50,000.00	1,180,000.00	1,130,000.00	95%	Completed	Project AP completed ahead of schedule.	PP-042
2026-07-01	Project AQ: Marketing Campaign	Robert Purple	700,000.00	720,000.00	20,000.00	700,000.00	720,000.00	100%	Completed	Project AQ completed with a slight budget overrun.	PQ-043
2026-08-01	Project AR: IT System Upgrade	Lisa Red	2,400,000.00	2,300,000.00	100,000.00	2,400,000.00	2,300,000.00	95%	Completed	Project AR completed ahead of schedule.	PR-044
2026-09-01	Project AS: Customer Service Portal	Kevin Green	740,000.00	760,000.00	20,000.00	740,000.00	760,000.00	100%	Completed	Project AS completed with a slight budget overrun.	PS-045
2026-10-01	Project AT: New Market Research	Amanda Blue	360,000.00	370,000.00	10,000.00	360,000.00	370,000.00	100%	Completed	Project AT completed with a slight budget overrun.	PT-046
2026-11-01	Project AU: HR System Upgrade	Chris Yellow	1,380,000.00	1,330,000.00	50,000.00	1,380,000.00	1,330,000.00	96%	Completed	Project AU completed ahead of schedule.	PU-047
2026-12-01	Project AV: Sales Training Program	Michelle Purple	460,000.00	480,000.00	20,000.00	460,000.00	480,000.00	100%	Completed	Project AV completed with a slight budget overrun.	PV-048
2027-01-01	Project AW: Logistics Optimization	James Red	600,000.00	580,000.00	20,000.00	600,000.00	580,000.00	97%	Completed	Project AW completed ahead of schedule.	PW-049
2027-02-01	Project AX: Financial Reporting System	Patricia Green	800,000.00	820,000.00	20,000.00	800,000.00	820,000.00	100%	Completed	Project AX completed with a slight budget overrun.	PX-050

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BPKAD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 20 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 Bab II pasal 2 yang mengatur tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi. Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang semakin transparan dan akuntabel dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan semakin meningkatkan kinerja perangkat daerah dan peningkatan pada aspek pelayanan masyarakat. Di sisi lain, kondisi era globalisasi sebagai faktor eksternal merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sanggau.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau selaku unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan harus mampu menjawab tantangan yang ada. Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah akan memberikan dampak yang sangat besar pada efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang akan berdampak langsung pada pelayanan masyarakat bahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Sanggau. Namun disisi lain sering berubahnya regulasi tentang mekanisme pengelolaan keuangan dan aset daerah dari pemerintah pusat akan memperlambat proses penyaluran dana dan anggaran yang akan berdampak langsung pada proses pembangunan di Kabupaten Sanggau.

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembiayaan, akuntansi dan aset daerah,
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pembiayaan, akuntansi dan aset daerah,
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pembiayaan, akuntansi dan aset daerah.

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang di bidang pembiayaan, akuntansi dan aset daerah.
5. Pelaksanaan administrasi di lingkup Badan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana BPKAD dan pencapaian renstra BPKAD Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019-2024
Kabupaten Sanggau

No	Indikator	SPK/ Standar Nasional	TSE	Target Kinerja Pelayanan Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Akhir
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Pemenuhan Target Anggaran Pemerintah Daerah sesuai RAP dan target lainnya			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Pemenuhan Target Pelayanan Administrasi dan Operasional Pemeliharaan Barang Milik Daerah			60	62	64	70	60	62	64	70	
3	RAP APBD BUKAN			CC	R	R	R	R	R	R	R	

Sanggau, 8 Juli 2025
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU


SILVESTRA DAYANA SIMBOLON, SE, MM
NIP. 19671126 199503 2 004

2.3. ISU – ISU PEYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BPKAD

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Sanggau. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal akan berdampak pada pelaksanaan peran BPKAD Kabupaten Sanggau untuk Tahun 2019-2024.

Sebagai sebuah institusi, BPKAD dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki hal – hal sebagai berikut:

- **TANTANGAN/ANCAMAN**

1. Akurasi data dan ketepatan waktu pencatran anggaran kegiatan.
2. Masih adanya aset di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah yang belum dioptimalkan.
3. Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset.
4. Pengintegrasian sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan aset.
5. Tuntutan transparansi informasi publik menuju *good governance*.
6. Kualitas SDM pengelola keuangan dan aset yang belum optimal.
7. Inventarisasi aset daerah yang belum maksimal.

- **PELUANG**

1. Sistem informasi pengelolaan keuangan lebih memudahkan dan membantu dalam perencanaan penganggaran, penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
2. Kualitas dan kapasitas SDM pengelola keuangan dan aset yang masih bisa dikembangkan.
3. Inventarisasi terhadap aset daerah yang masih bisa dioptimalkan.
4. Pengintegrasian sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

• **KEKUATAN**

1. Sumber Daya Manusia yang tersedia berdasarkan kebijakan klasifikasi pangkat, pendidikan dan pelatihan.
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah berperan penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan tugas dan fungsi dan kewenangan yang diberikan.
3. Ketersediaan software Sistem Aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memadai serta mendukung tugas pelayanan sehari-hari.

• **KELEMAHAN**

1. Perubahan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah berakibat pada perubahan dasar hukum perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan dan aset daerah.
2. Kebutuhan belanja daerah lebih besar dari kapasitas keuangan daerah dalam pendanaan program / kegiatan pembangunan daerah.
3. "Idle Assets" (kekayaan/Aset daerah yang belum dimanfaatkan) belum teridentifikasi secara jelas.
4. Ketergantungan terhadap dana pusat masih sangat kuat.

Analisis SWOT

Kelebihan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
• Sumber Daya Manusia yang tersedia berdasarkan ketajaman keahlian (pengkaji, penulisan, dan pelatihan) • Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Badan Kerja Pengelola Keuangan Daerah berperan penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan Tupoksi dan kewenangan yang diberikan • Keterbatasan sistem Sistem Aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memadai serta mendukung tugas pelayanan sehari-hari.	• Perubahan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah terlihat pada perubahan dasar hukum, peraturan, pelaksanaan, pelaksanaan, pelaksanaan, pelaksanaan serta pengarsipan keuangan dan aset daerah • Kelangkaan tenaga daerah lebih besar dari kapasitas keuangan daerah dalam mendukung program/ kegiatan pembangunan daerah • "Aset silo" Kabupaten/Aset daerah yang belum terintegrasi dalam terintegrasi secara jelas • Keterbatasan terhadap dana pusat masih sangat besar
Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
• Sistem informasi pengelolaan keuangan lebih memudahkan dan membantu dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaksanaan laporan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel • Kualitas dan kapasitas SDM pengelola keuangan dan aset yang masih bisa ditingkatkan • Inventarisasi terhadap aset daerah yang masih bisa dioptimalkan • Pengintegrasian sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	• Akumulasi data dan ketepatan waktu penyusunan laporan • Masih adanya aset di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang belum dioptimalkan • Profesionalitas dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset • Pengintegrasian sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan aset • Tuntutan transparansi informasi publik terhadap pemerintah • Kualitas SDM pengelola keuangan dan aset yang belum optimal • Inventarisasi aset daerah yang belum maksimal

Permasalahan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Sanggau dapat dikelompokkan berdasarkan urusan keuangan pemerintahan yang menjadi perhatian Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sebagai berikut:

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Belum Optimal	Regulasi Barang Milik Daerah yang belum memadai	- Kebijakan peraturan Barang Milik Daerah yang tersedia belum mengakomodir kebutuhan pengelolaan Barang Milik Daerah saat ini. - Pemertuaan Barang Milik Daerah belum sepenuhnya menerapkan 3 unsur penting yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. - Pemertuaan Barang Milik Daerah yang belum optimal dan sesuai regulasi yang ada.
	Belum tersedianya Aplikasi Keuangan dan Pengelolaan Aset yang terintegrasi	Keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah	- Dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah seperti sertifikat, BPKB, NPWD dan BAST khusus Barang Milik Daerah tidak. - Kualitas SDM Pejabat Pemertuaan Keuangan dan SDM Pemertuaan Aset pada Perangkat Daerah belum memadai. - Adanya pergantian petugas akuntansi dan penyusunan laporan keuangan karena promosi dan mutasi dimana pengisian ASN bukanlah wewenang dari BPKAD melainkan BKPSDM.

		• Belum terintegrasinya Sistem Pengelaaan Keuangan dan Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mempengaruhi proses penyusunan Neraca Aset sehingga berdampak pada penyusunan Laporan Keuangan secara keseluruhan. • Dinamisnya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah serta pelaporan keuangan daerah. • Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur jaringan teknologi informasi yang menunjang pemanfaatan aplikasi pengelolaan keuangan daerah sebagai alat bantu pengelolaan keuangan daerah. • Belum adanya tenaga IT yang berlatar belakang pendidikan akuntansi di Bidang Akuntansi yang memahami secara detail aplikasi pengelolaan keuangan guna mendukung percepatan penyampaian informasi pelaporan keuangan daerah.
3	Belum Optimalnya Penyampaian Informasi Pelaporan Keuangan Daerah Keterlambatan penyampaian informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan dan Laporan Lainnya kepada entitas pelaporan	• Kualitas SDM pejabat perencanaan keuangan pada Perangkat Daerah belum memadai • Pejabat yang ditunjuk kurang memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
4	Perencanaan anggaran perangkat daerah belum optimal Sering terjadi kesalahan pemilihan kode rekening belanja	

5.	Pembinaan Keuangan Perangkat Daerah belum maksimal	Keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban bulanan SKPD	• Kualitas SDM pejabat pengelola keuangan pada Perangkat Daerah belum memadai. • Kualifikasi pejabat yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran banyak yang tidak memenuhi syarat. • Dimensi/nya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.
----	---	--	--

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh BPKAD berdasarkan tabel di atas adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kepedulian terhadap penatausahaan aset.
2. Pencatatan aset belum dilaksanakan secara baik.
3. Persepal yang tidak mengedepankan potensi pemanfaatan aset bagi pendapatan daerah.
4. Adanya aset yang dikuasai oleh ASN yang purna tugas dan masyarakat karena pemberian sanksi kurang tegas.
5. Keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah.
6. Keterlambatan penyampaian informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan dan Laporan Lainnya kepada entitas pelaporan.
7. Sering terjadi kesalahan pemilihan kode rekening belanja.
8. Keterlambatan penyampaian laporan pertanggung jawaban bulanan skpd.

Bertitik tolak dari isu-isu strategis Kabupaten Sanggau dan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada BPKAD Kabupaten Sanggau, maka ditetapkan beberapa isu-isu strategis BPKAD Kabupaten Sanggau untuk 5 (lima) tahun kedepan, yaitu:

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
2. Kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Sanggau.
3. Peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara.
4. Kualitas pelayanan publik.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan.

Program dan Kegiatan yang ada pada RKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau tidak mengalami Perubahan yang signifikan dan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Tahun 2019-2024, namun ada perubahan terhadap besarnya pagu indikatif atau besarnya jumlah anggaran yang diusulkan untuk membiayai rencana kegiatan.

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja tahunan perjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Perubahan (RENJA) BPKAD Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sanggau.

Untuk selengkapnya, review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Review terhadap Rancangan Awal RRPD Tahun 2025 Kabupaten Sanggau

PERENCANAAN DASAR : RAPAS PERENCANAAN KEBERKAWAHLAN ASSET HARIAN

Rencana Pelaksanaan Sekolah Tahunan												
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Aksi RPPD			Page Indikator	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kedepannya (Rinc)	Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Page Indikator							
1	PROSEDUR KERJA (AKSI) KEBERHASILAN KEBERHASILAN	di tempat kerja	Prosedur Kerja (AKSI) KEBERHASILAN KEBERHASILAN	12	Rp 1.120.000.000,00	PROSEDUR KERJA (AKSI) KEBERHASILAN KEBERHASILAN	di tempat kerja	Prosedur Kerja (AKSI) KEBERHASILAN KEBERHASILAN	12	Rp 1.120.000.000,00		
2	Prosedur Kerja (AKSI) KEBERHASILAN KEBERHASILAN	di tempat kerja	Prosedur Kerja (AKSI) KEBERHASILAN KEBERHASILAN	12	Rp 1.120.000.000,00	Prosedur Kerja (AKSI) KEBERHASILAN KEBERHASILAN	di tempat kerja	Prosedur Kerja (AKSI) KEBERHASILAN KEBERHASILAN	12	Rp 1.120.000.000,00		
3	Prosedur Kerja (AKSI) KEBERHASILAN KEBERHASILAN	di tempat kerja	Prosedur Kerja (AKSI) KEBERHASILAN KEBERHASILAN	12	Rp 1.120.000.000,00	Prosedur Kerja (AKSI) KEBERHASILAN KEBERHASILAN	di tempat kerja	Prosedur Kerja (AKSI) KEBERHASILAN KEBERHASILAN	12	Rp 1.120.000.000,00		
4	Prosedur Kerja (AKSI) KEBERHASILAN KEBERHASILAN	di tempat kerja	Prosedur Kerja (AKSI) KEBERHASILAN KEBERHASILAN	12	Rp 1.120.000.000,00	Prosedur Kerja (AKSI) KEBERHASILAN KEBERHASILAN	di tempat kerja	Prosedur Kerja (AKSI) KEBERHASILAN KEBERHASILAN	12	Rp 1.120.000.000,00		
5	Prosedur Kerja (AKSI) KEBERHASILAN KEBERHASILAN	di tempat kerja	Prosedur Kerja (AKSI) KEBERHASILAN KEBERHASILAN	12	Rp 1.120.000.000,00	Prosedur Kerja (AKSI) KEBERHASILAN KEBERHASILAN	di tempat kerja	Prosedur Kerja (AKSI) KEBERHASILAN KEBERHASILAN	12	Rp 1.120.000.000,00		
6	Prosedur Kerja (AKSI) KEBERHASILAN KEBERHASILAN	di tempat kerja	Prosedur Kerja (AKSI) KEBERHASILAN KEBERHASILAN	12	Rp 1.120.000.000,00	Prosedur Kerja (AKSI) KEBERHASILAN KEBERHASILAN	di tempat kerja	Prosedur Kerja (AKSI) KEBERHASILAN KEBERHASILAN	12	Rp 1.120.000.000,00		
7	Prosedur Kerja (AKSI) KEBERHASILAN KEBERHASILAN	di tempat kerja	Prosedur Kerja (AKSI) KEBERHASILAN KEBERHASILAN	12	Rp 1.120.000.000,00	Prosedur Kerja (AKSI) KEBERHASILAN KEBERHASILAN	di tempat kerja	Prosedur Kerja (AKSI) KEBERHASILAN KEBERHASILAN	12	Rp 1.120.000.000,00		
8	Prosedur Kerja (AKSI) KEBERHASILAN KEBERHASILAN	di tempat kerja	Prosedur Kerja (AKSI) KEBERHASILAN KEBERHASILAN	12	Rp 1.120.000.000,00	Prosedur Kerja (AKSI) KEBERHASILAN KEBERHASILAN	di tempat kerja	Prosedur Kerja (AKSI) KEBERHASILAN KEBERHASILAN	12	Rp 1.120.000.000,00		
9	Prosedur Kerja (AKSI) KEBERHASILAN KEBERHASILAN	di tempat kerja	Prosedur Kerja (AKSI) KEBERHASILAN KEBERHASILAN	12	Rp 1.120.000.000,00	Prosedur Kerja (AKSI) KEBERHASILAN KEBERHASILAN	di tempat kerja	Prosedur Kerja (AKSI) KEBERHASILAN KEBERHASILAN	12	Rp 1.120.000.000,00		
10	Prosedur Kerja (AKSI) KEBERHASILAN KEBERHASILAN	di tempat kerja	Prosedur Kerja (AKSI) KEBERHASILAN KEBERHASILAN	12	Rp 1.120.000.000,00	Prosedur Kerja (AKSI) KEBERHASILAN KEBERHASILAN	di tempat kerja	Prosedur Kerja (AKSI) KEBERHASILAN KEBERHASILAN	12	Rp 1.120.000.000,00		

No	Programa/Objetivo	Barragem And BPPD				Barragem Kibuliabasa				Substancia Data	Caracter Postigo
		Local	Substancia Alimento	Target Capacities	Paga Indikatif	Programa/Objetivo	Substancia	Target Capacities	Substancia Data		
1	Administrasi dan Perencanaan Laporan Keuangan BPPD dan BPPD	Ses. Program	Aspek Laporan Keuangan BPPD dan BPPD dan Perencanaan Laporan Keuangan BPPD dan BPPD	(1) Laporan Keuangan BPPD dan BPPD	Rp. 10.000.000.000	Administrasi dan Perencanaan Laporan Keuangan BPPD dan BPPD	Ses. Program	(1) Laporan Keuangan BPPD dan BPPD	Rp. 10.000.000.000	(1) Laporan	
2	Teknik Penyusunan Laporan Keuangan BPPD dan BPPD	Ses. Program	Aspek Laporan Keuangan BPPD dan BPPD dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan BPPD dan BPPD	(2) Laporan Keuangan BPPD dan BPPD	Rp. 10.000.000.000	Teknik Penyusunan Laporan Keuangan BPPD dan BPPD	Ses. Program	(2) Laporan Keuangan BPPD dan BPPD	Rp. 10.000.000.000	(2) Laporan	
3	Administrasi dan Perencanaan Laporan Keuangan BPPD dan BPPD	Ses. Program	Aspek Laporan Keuangan BPPD dan BPPD dan Perencanaan Laporan Keuangan BPPD dan BPPD	(3) Laporan Keuangan BPPD dan BPPD	Rp. 10.000.000.000	Administrasi dan Perencanaan Laporan Keuangan BPPD dan BPPD	Ses. Program	(3) Laporan Keuangan BPPD dan BPPD	Rp. 10.000.000.000	(3) Laporan	
4	Teknik Penyusunan Laporan Keuangan BPPD dan BPPD	Ses. Program	Aspek Laporan Keuangan BPPD dan BPPD dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan BPPD dan BPPD	(4) Laporan Keuangan BPPD dan BPPD	Rp. 10.000.000.000	Teknik Penyusunan Laporan Keuangan BPPD dan BPPD	Ses. Program	(4) Laporan Keuangan BPPD dan BPPD	Rp. 10.000.000.000	(4) Laporan	
5	Administrasi dan Perencanaan Laporan Keuangan BPPD dan BPPD	Ses. Program	Aspek Laporan Keuangan BPPD dan BPPD dan Perencanaan Laporan Keuangan BPPD dan BPPD	(5) Laporan Keuangan BPPD dan BPPD	Rp. 10.000.000.000	Administrasi dan Perencanaan Laporan Keuangan BPPD dan BPPD	Ses. Program	(5) Laporan Keuangan BPPD dan BPPD	Rp. 10.000.000.000	(5) Laporan	
6	Teknik Penyusunan Laporan Keuangan BPPD dan BPPD	Ses. Program	Aspek Laporan Keuangan BPPD dan BPPD dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan BPPD dan BPPD	(6) Laporan Keuangan BPPD dan BPPD	Rp. 10.000.000.000	Teknik Penyusunan Laporan Keuangan BPPD dan BPPD	Ses. Program	(6) Laporan Keuangan BPPD dan BPPD	Rp. 10.000.000.000	(6) Laporan	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Haut Auswale Substanzien										
Besprenge des Projekts					Haut Auswale Substanzien					
No	Program/Regionen	Lebens	Substanz Risiko	Target Capital	Page Indikat	Program/Regionen	Lebens	Indikator Risiko	Target Capital	Substanz Risiko
42	Erstellung des Projekts Erstellung des Projekts Erstellung des Projekts	mit mit mit	Erstellung des Projekts Erstellung des Projekts Erstellung des Projekts	1.000.000	1.000.000	Erstellung des Projekts Erstellung des Projekts Erstellung des Projekts	mit mit mit	Erstellung des Projekts Erstellung des Projekts Erstellung des Projekts	1.000.000	1.000.000
43	Erstellung des Projekts Erstellung des Projekts Erstellung des Projekts	mit mit mit	Erstellung des Projekts Erstellung des Projekts Erstellung des Projekts	1.000.000	1.000.000	Erstellung des Projekts Erstellung des Projekts Erstellung des Projekts	mit mit mit	Erstellung des Projekts Erstellung des Projekts Erstellung des Projekts	1.000.000	1.000.000
44	Erstellung des Projekts Erstellung des Projekts Erstellung des Projekts	mit mit mit	Erstellung des Projekts Erstellung des Projekts Erstellung des Projekts	1.000.000	1.000.000	Erstellung des Projekts Erstellung des Projekts Erstellung des Projekts	mit mit mit	Erstellung des Projekts Erstellung des Projekts Erstellung des Projekts	1.000.000	1.000.000
45	Erstellung des Projekts Erstellung des Projekts Erstellung des Projekts	mit mit mit	Erstellung des Projekts Erstellung des Projekts Erstellung des Projekts	1.000.000	1.000.000	Erstellung des Projekts Erstellung des Projekts Erstellung des Projekts	mit mit mit	Erstellung des Projekts Erstellung des Projekts Erstellung des Projekts	1.000.000	1.000.000
46	Erstellung des Projekts Erstellung des Projekts Erstellung des Projekts	mit mit mit	Erstellung des Projekts Erstellung des Projekts Erstellung des Projekts	1.000.000	1.000.000	Erstellung des Projekts Erstellung des Projekts Erstellung des Projekts	mit mit mit	Erstellung des Projekts Erstellung des Projekts Erstellung des Projekts	1.000.000	1.000.000

Realisasi Anggaran Tahun 2020														Catatan Penting	
No	Program/Regulasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Page Anggaran	Program/Regulasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Rechtsbescherm	Realisasi Anggaran Tahun 2020			Catatan Penting	
											Program/Regulasi	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian
17	Penyediaan Pengkondisian, Pemeliharaan, dan Pengembangan Ruang Publik Terbuka	Sub Anggaran	Penyediaan Pengkondisian, Pemeliharaan, dan Pengembangan Ruang Publik Terbuka	1 Eksistensi	Rp 140.322.433,00	Penyediaan Pengkondisian, Pemeliharaan, dan Pengembangan Ruang Publik Terbuka	Sub Anggaran	Penyediaan Pengkondisian, Pemeliharaan, dan Pengembangan Ruang Publik Terbuka	1 Eksistensi	Rp 140.322.433,00					
18	Pengkondisian Ruang Publik Terbuka	Sub Anggaran	Pengkondisian Ruang Publik Terbuka	1 Eksistensi	Rp 140.322.433,00	Pengkondisian Ruang Publik Terbuka	Sub Anggaran	Pengkondisian Ruang Publik Terbuka	1 Eksistensi	Rp 140.322.433,00					
19	Pengkondisian Ruang Publik Terbuka	Sub Anggaran	Pengkondisian Ruang Publik Terbuka	1 Eksistensi	Rp 140.322.433,00	Pengkondisian Ruang Publik Terbuka	Sub Anggaran	Pengkondisian Ruang Publik Terbuka	1 Eksistensi	Rp 140.322.433,00					
20	Pengkondisian Ruang Publik Terbuka	Sub Anggaran	Pengkondisian Ruang Publik Terbuka	1 Eksistensi	Rp 140.322.433,00	Pengkondisian Ruang Publik Terbuka	Sub Anggaran	Pengkondisian Ruang Publik Terbuka	1 Eksistensi	Rp 140.322.433,00					
21	Pengkondisian Ruang Publik Terbuka	Sub Anggaran	Pengkondisian Ruang Publik Terbuka	1 Eksistensi	Rp 140.322.433,00	Pengkondisian Ruang Publik Terbuka	Sub Anggaran	Pengkondisian Ruang Publik Terbuka	1 Eksistensi	Rp 140.322.433,00					
Jumlah											Rp 140.322.433,00	Jumlah			

Tanggal: 8 Juli 2023
 KEMALA PERHILJANA, SEKRETARIS
 BAKAS ANTI GEREBAK (BAGAS ANTI GEREBAK)
 BAKAS ANTI GEREBAK (BAGAS ANTI GEREBAK)
 BAKAS ANTI GEREBAK (BAGAS ANTI GEREBAK)
 BAKAS ANTI GEREBAK (BAGAS ANTI GEREBAK)

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan BPKAD Kabupaten Sanggau.

Mengingat BPKAD merupakan Perangkat Daerah yang tidak terkait langsung dengan pelayanan publik, maka telaahan terhadap usulan masyarakat lebih diutamakan dalam upaya penyusunan dokumen perencanaan yang lebih baik dan akuntabel.

Untuk selanjutnya, program dan kegiatan yang terkait kepentingan masyarakat dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Sanggau
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau

NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1.				-	-

Sunggau, 6 Juli 2023
KEPALA PENGELOLA KEUANGAN
DAS ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU


SILVESTRA DAYANA SIMBOLON, SE, MM
NIP. 19631126 199003 2 004

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BPKAD

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Beberapa Kebijakan Nasional dalam perencanaan pembangunan yang harus menjadi acuan Pemerintah Daerah termasuk Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perubahan Pemerintah (RKP);
3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Nasional yang Berkeadilan;
4. Percepatan dan pencapaian target Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDG's).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau merupakan perjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang berisikan tentang tujuan, sasaran, arah kebijakan, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah. Dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan peluang yang dimiliki Kabupaten Sanggau, nilai-nilai visi daerah, aspirasi, dan dinamika yang berkembang pada masa 5 tahun sebelumnya (Tahun 2019-2024), maka visi Kabupaten Sanggau untuk periode 2025-2029 adalah:

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Dalam mencapai Visi Kabupaten Sanggau yaitu **"Sanggau Maju Berkelanjutan dan Berkeadilan"**, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau melaksanakan Misi ke-5 yaitu **"Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur Sipil Negara yang Profesional"**.

Adapun tujuan jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau sesuai tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sanggau adalah:

"Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan transparan dalam memberikan pelayanan publik".

3.2. TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENJA BPKAD

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi BPKAD Kabupaten Sanggau dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu satu sampai lima tahun. Dimana tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan personil melalui pendidikan dan pelatihan;
2. Meningkatkan kualitas penganggaran sesuai dokumen perencanaan dan standar satuan harga;
3. Mewujudkan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tertib dan akuntabel;
4. Mewujudkan pengelolaan barang milik daerah secara tertib dan teratur sesuai ketentuan.

Sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau sesuai tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sanggau adalah Tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal pemerintah daerah
3. Meningkatnya kualitas layanan publik

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial.
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat yang berbasis pada pertanian, kehutanan, perkebunan, pertambangan, pariwisata, perdagangan dan industri yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan dengan didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan demokratis serta berorientasi pada pelayanan publik.

4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan supremasi hukum.
5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang bertumpu pada kearifan lokal dan kelestarian lingkungan dengan tetap memperhatikan keselarasan dengan pembangunan nasional
6. Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, religius, berbudaya, demokratis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal.
7. Meningkatkan percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
8. Meningkatkan penataan infrastruktur ibukota kabupaten, infrastruktur ibukota kecamatan dan percepatan pembangunan wilayah pedesaan dengan bertumpu pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Keterkaitan antara Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada misi ke tiga yaitu ***"Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur Sipil Negara yang Profesional"***

Program dan kegiatan yang ditetapkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dan ingin dicapai dalam tahun anggaran 2025 bersumber dari pendanaan APBD Kabupaten Sanggau yang meliputi 3 (Tiga) program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 70 (Tujuh Puluh) Sub kegiatan dengan total kebutuhan dana/ pagu indikatif sebesar Rp281.769.086.163,33.

Berikut terlampir Tabel yang berisi Rumusan Rencana dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Maju Tahun 2026 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau sebagai berikut:

**Rencana Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2023 dan Perkiraan Mula Tahun 2026 Kabupaten Banggai**

Salah satu dari

Rencana Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Gedung/Building/Unit Pemeriksaan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Mula Tahun 2026	
			Tahun	Target Kuantitas Rencana	Subsidiar Output / Page (Indikator)	Subsidiar Tindakan		Target Output Asumsi	Subsidiar Output / Page (Indikator)
3.02.01	REKREASI PERIBAHAS UMUM PENGERTIAN ALAM GASALAH	Program Konservasi alam dan peninggalan pencapaian kultural wisata	3	10	10	APRO KAH Banggai		10	10
3.02.01.3.01	Program Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Pengembangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersebut dengan baik dan tepat waktu	Kab. Banggai	1.2 Dokumen	Rp 88.033.414.00	APRO KAH Banggai	1.2 Dokumen	1.2 Dokumen	Rp 88.033.414.00
3.02.01.3.01.001	Program Pengembangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Pengembangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersebut dengan baik dan tepat waktu	Kab. Banggai	1.2 Dokumen	Rp 12.334.733.00	APRO KAH Banggai	1.2 Dokumen	1.2 Dokumen	Rp 12.334.733.00
3.02.01.3.01.002	Program Pengembangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Pengembangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersebut dengan baik dan tepat waktu	Kab. Banggai	1.2 Dokumen	Rp 12.334.733.00	APRO KAH Banggai	1.2 Dokumen	1.2 Dokumen	Rp 12.334.733.00
3.02.01.3.01.003	Program Pengembangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Pengembangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersebut dengan baik dan tepat waktu	Kab. Banggai	1.2 Dokumen	Rp 12.334.733.00	APRO KAH Banggai	1.2 Dokumen	1.2 Dokumen	Rp 12.334.733.00
3.02.01.3.01.004	Program Pengembangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Pengembangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersebut dengan baik dan tepat waktu	Kab. Banggai	1.2 Dokumen	Rp 12.334.733.00	APRO KAH Banggai	1.2 Dokumen	1.2 Dokumen	Rp 12.334.733.00

Kode	Uraian/Detail Uraian Program/Unit/Thema dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Rencana Tahun 2023				Uraian Pencapaian	Kendaraan Khusus/Program Tahunan		
			Jumlah	Target Capaian Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Sumber Dana		Target Capaian Kegiatan	Kendaraan Khusus/Program Tahunan	
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
1.02.01.1.00.000	Program/Detail Uraian Dana Bantuan Sosial Kegiatan/Program	Aspek Pelaksanaan Dana Bantuan Sosial Kegiatan/Program	Kab. Banggai	75 Paket	Rp. 0,00	APBD Kab. Banggai		75 Paket	Rp. 0,00	
1.02.01.1.00.000	Program/Detail Uraian Dana Bantuan Sosial Kegiatan/Program	Aspek Pelaksanaan Dana Bantuan Sosial Kegiatan/Program	Kab. Banggai	1 Paket	Rp. 0,00	APBD Kab. Banggai		1 Paket	Rp. 0,00	
1.02.01.1.00.000	Program/Detail Uraian Dana Bantuan Sosial Kegiatan/Program	Aspek Pelaksanaan Dana Bantuan Sosial Kegiatan/Program	Kab. Banggai	0 Paket	Rp. 0,00	APBD Kab. Banggai		0 Paket	Rp. 0,00	
1.02.01.1.00.000	Program/Detail Uraian Dana Bantuan Sosial Kegiatan/Program	Aspek Pelaksanaan Dana Bantuan Sosial Kegiatan/Program	Kab. Banggai	100%	Rp. 1.347.314.710,00	APBD Kab. Banggai		100%	Rp. 1.347.314.710,00	
1.02.01.1.00.000	Program/Detail Uraian Dana Bantuan Sosial Kegiatan/Program	Aspek Pelaksanaan Dana Bantuan Sosial Kegiatan/Program	Kab. Banggai	200 Paket	Rp. 110.000.000,00	APBD Kab. Banggai		200 Paket	Rp. 110.000.000,00	
1.02.01.1.00.000	Program/Detail Uraian Dana Bantuan Sosial Kegiatan/Program	Aspek Pelaksanaan Dana Bantuan Sosial Kegiatan/Program	Kab. Banggai	10 Paket	Rp. 0,00	APBD Kab. Banggai		10 Paket	Rp. 0,00	
1.02.01.1.00.000	Program/Detail Uraian Dana Bantuan Sosial Kegiatan/Program	Aspek Pelaksanaan Dana Bantuan Sosial Kegiatan/Program	Kab. Banggai	14.240 Paket	Rp. 660.000.000,00	APBD Kab. Banggai		14.240 Paket	Rp. 660.000.000,00	
1.02.01.1.00.000	Program/Detail Uraian Dana Bantuan Sosial Kegiatan/Program	Aspek Pelaksanaan Dana Bantuan Sosial Kegiatan/Program	Kab. Banggai	7 Paket	Rp. 100.000.000,00	APBD Kab. Banggai		7 Paket	Rp. 100.000.000,00	
1.02.01.1.00.000	Program/Detail Uraian Dana Bantuan Sosial Kegiatan/Program	Aspek Pelaksanaan Dana Bantuan Sosial Kegiatan/Program	Kab. Banggai	300 Paket	Rp. 110.000.000,00	APBD Kab. Banggai		300 Paket	Rp. 110.000.000,00	
1.02.01.1.00.000	Program/Detail Uraian Dana Bantuan Sosial Kegiatan/Program	Aspek Pelaksanaan Dana Bantuan Sosial Kegiatan/Program	Kab. Banggai	200 Paket	Rp. 600.000.000,00	APBD Kab. Banggai		200 Paket	Rp. 600.000.000,00	

Kode	Program (Berkas Utama) Administrasi Daerah (di Program/Region)	Indikator Kinerja Program/Region	Rencana Tahun					Catatan Penting	Target Capaian Regional	Tercapai Capaian Regional	Estimasi (dari Data) Pada Akhir Tahun
			2025								
			Unit	Target Capaian Regional	Komitmen (Berkas Utama) Kebijakan	Realisasi (Berkas Utama)	Realisasi (Data)				
1.01.01.01.01.001	1.1	1.1	100%	100%	Rp 1.417.724.137,20	Rp 1.417.724.137,20	100%	Rp 1.417.724.137,20			
1.01.01.01.01.002	1.1	1.1	100%	100%	Rp 1.417.724.137,20	Rp 1.417.724.137,20	100%	Rp 1.417.724.137,20			
1.01.01.01.01.003	1.1	1.1	100%	100%	Rp 1.417.724.137,20	Rp 1.417.724.137,20	100%	Rp 1.417.724.137,20			
1.01.01.01.01.004	1.1	1.1	100%	100%	Rp 1.417.724.137,20	Rp 1.417.724.137,20	100%	Rp 1.417.724.137,20			
1.01.01.01.01.005	1.1	1.1	100%	100%	Rp 1.417.724.137,20	Rp 1.417.724.137,20	100%	Rp 1.417.724.137,20			
1.01.01.01.01.006	1.1	1.1	100%	100%	Rp 1.417.724.137,20	Rp 1.417.724.137,20	100%	Rp 1.417.724.137,20			
1.01.01.01.01.007	1.1	1.1	100%	100%	Rp 1.417.724.137,20	Rp 1.417.724.137,20	100%	Rp 1.417.724.137,20			
1.01.01.01.01.008	1.1	1.1	100%	100%	Rp 1.417.724.137,20	Rp 1.417.724.137,20	100%	Rp 1.417.724.137,20			
1.01.01.01.01.009	1.1	1.1	100%	100%	Rp 1.417.724.137,20	Rp 1.417.724.137,20	100%	Rp 1.417.724.137,20			
1.01.01.01.01.010	1.1	1.1	100%	100%	Rp 1.417.724.137,20	Rp 1.417.724.137,20	100%	Rp 1.417.724.137,20			
1.01.01.01.01.011	1.1	1.1	100%	100%	Rp 1.417.724.137,20	Rp 1.417.724.137,20	100%	Rp 1.417.724.137,20			
1.01.01.01.01.012	1.1	1.1	100%	100%	Rp 1.417.724.137,20	Rp 1.417.724.137,20	100%	Rp 1.417.724.137,20			
1.01.01.01.01.013	1.1	1.1	100%	100%	Rp 1.417.724.137,20	Rp 1.417.724.137,20	100%	Rp 1.417.724.137,20			
1.01.01.01.01.014	1.1	1.1	100%	100%	Rp 1.417.724.137,20	Rp 1.417.724.137,20	100%	Rp 1.417.724.137,20			
1.01.01.01.01.015	1.1	1.1	100%	100%	Rp 1.417.724.137,20	Rp 1.417.724.137,20	100%	Rp 1.417.724.137,20			
1.01.01.01.01.016	1.1	1.1	100%	100%	Rp 1.417.724.137,20	Rp 1.417.724.137,20	100%	Rp 1.417.724.137,20			
1.01.01.01.01.017	1.1	1.1	100%	100%	Rp 1.417.724.137,20	Rp 1.417.724.137,20	100%	Rp 1.417.724.137,20			
1.01.01.01.01.018	1.1	1.1	100%	100%	Rp 1.417.724.137,20	Rp 1.417.724.137,20	100%	Rp 1.417.724.137,20			
1.01.01.01.01.019	1.1	1.1	100%	100%	Rp 1.417.724.137,20	Rp 1.417.724.137,20	100%	Rp 1.417.724.137,20			
1.01.01.01.01.020	1.1	1.1	100%	100%	Rp 1.417.724.137,20	Rp 1.417.724.137,20	100%	Rp 1.417.724.137,20			

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD

Untuk mewujudkan visi dan misi harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau yang ditetapkan mencakupi penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan atau petunjuk bagi setiap pelaksana kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah dengan masyarakat sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategi berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun.

Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi.

Dari seluruh sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang ditetapkan dan ingin dicapai dalam tahun anggaran 2025 adalah meliputi 3 (Tiga) program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 70 (Tujuh Puluh) Sub kegiatan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

- **Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - ❖ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - ❖ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - ❖ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ❖ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - ❖ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - ❖ Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - ❖ Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - ❖ Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - ❖ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - ❖ Pengadaan Pakiaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - ❖ Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - ❖ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ❖ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - ❖ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - ❖ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - ❖ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - ❖ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - ❖ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - ❖ Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - ❖ Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - ❖ Pengadaan Mebel

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ❖ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - ❖ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ❖ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - ❖ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - ❖ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - ❖ Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
 - ❖ Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
 - ❖ Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ❖ Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 - ❖ Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 - ❖ Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- ❖ Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- Verifikasi Pendapatan
 - ❖ Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 - ❖ Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
 - ❖ Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
 - ❖ Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
 - ❖ Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - ❖ Analisa Investasi Pemerintah Daerah
 - ❖ Analisa Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 - ❖ Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - ❖ Penyusunan Standar Harga
 - ❖ Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - ❖ Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - ❖ Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - ❖ Pemertuaan Barang Milik Daerah

- ❖ Inventarisasi Barang Milik Daerah
- ❖ Pengamanan Barang Milik Daerah
- ❖ Penilaian Barang Milik Daerah
- ❖ Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- ❖ Optimalisasi Pengurusan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- ❖ Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- ❖ Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- ❖ Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Renja Perubahan BPKAD) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya mengalir kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja Perubahan BPKAD Kabupaten Sanggau Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan teknis tahunan, sebagai implementasi dari Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Renstra BPKAD) Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029.

Renja Perubahan BPKAD Kabupaten Sanggau Tahun 2025 memuat tentang program, kegiatan dan target-target capaian sasaran yang harus dicapai pada Tahun 2025. Rencana Kerja Perubahan ini selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BPKAD. Rencana Kerja Perubahan juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf kearah yang lebih baik dimasa datang.

Disusunnya Renja Perubahan BPKAD Tahun 2025 diharapkan menjadi bahan bagi Aparatur BPKAD Kabupaten Sanggau dalam mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, program, dan Kegiatan yang telah ditetapkan bersama untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Renja Perubahan BPKAD Kabupaten Sanggau Tahun 2025 ini tentunya tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami nantikan guna perbaikan kinerja organisasi dimasa yang akan datang.

Demikian semoga Renja Perubahan BPKAD Kabupaten Sanggau Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas aparatur pengelolaan keuangan dan aset daerah khususnya, serta Pemerintah Kabupaten Sanggau pada umumnya.